

# Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas



Pra Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Aceh 2016  
Aula Prof. A. Madjid Ibrahim Bappeda Aceh, 3 April 2015

## Dadang Solihin



Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 LAN-RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI yang dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email [dadangsol@gmail.com](mailto:dadangsol@gmail.com) HP 08129322202 web: <http://dadang-solihin.blogspot.com>

# Materi

- RPJMN 2015 – 2019
- Kerangka Ekonomi Makro 2016
- Penyusunan RKP 2016
- Koordinasi Agenda Prioritas Nasional
  1. Kedaulatan Pangan
  2. Kedaulatan Energi
  3. Kemaritiman
  4. Industri/Kawasan Industri
  5. Pariwisata
  6. Revolusi Mental
  7. Kawasan Perbatasan



# RPJMN 2015 - 2019

# Struktur RPJMN 2015-2019

## VISI:

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

7 MISI

NAWACITA  
9 Agenda Prioritas

TRISAKTI

Berdaulat dalam  
Bidang Politik

- 12 Program Aksi
- 115 Prioritas Utama

Berdikari dalam  
Bidang Ekonomi

- 16 Program Aksi

Berkepribadian dalam  
Bidang Kebudayaan

- 3 Program Aksi

# Misi

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

# 9 Agenda Prioritas - NAWACITA

1. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara,
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya,
3. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan,
4. Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya,
5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia,
6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional,
7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik,
8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa,
9. Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia.

# Menuju Indonesia yang Jauh Lebih Baik

1. Mengejar peningkatan daya saing,
2. Meningkatkan kualitas manusia termasuk melalui pembangunan mental,
3. Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan,
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat dan berkualitas,
5. Mengurangi ketimpangan antarwilayah,
6. Memulihkan kerusakan lingkungan,
7. Memajukan kehidupan bermasyarakat.





# Strategi Pembangunan Nasional

## NORMA PEMBANGUNAN

- 1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;
- 2) Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar;
- 3) Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan.
- 4) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

## 3 DIMENSI PEMBANGUNAN

### DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

Mental / Karakter

### DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan

Kemaritiman dan Kelautan

Pariwisata dan Industri

### DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

Antarkelempok  
Pendapatan

Antarwilayah:

- (1) Desa,
- (2) Pinggiran,
- (3) Luar Jawa,
- (4) Kawasan Timur

## KONDISI PERLU

Kepastian dan  
Penegakan Hukum

Keamanan dan  
Ketertiban

Politik & Demokrasi

Tata Kelola & RB

## QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

# Sasaran Makro

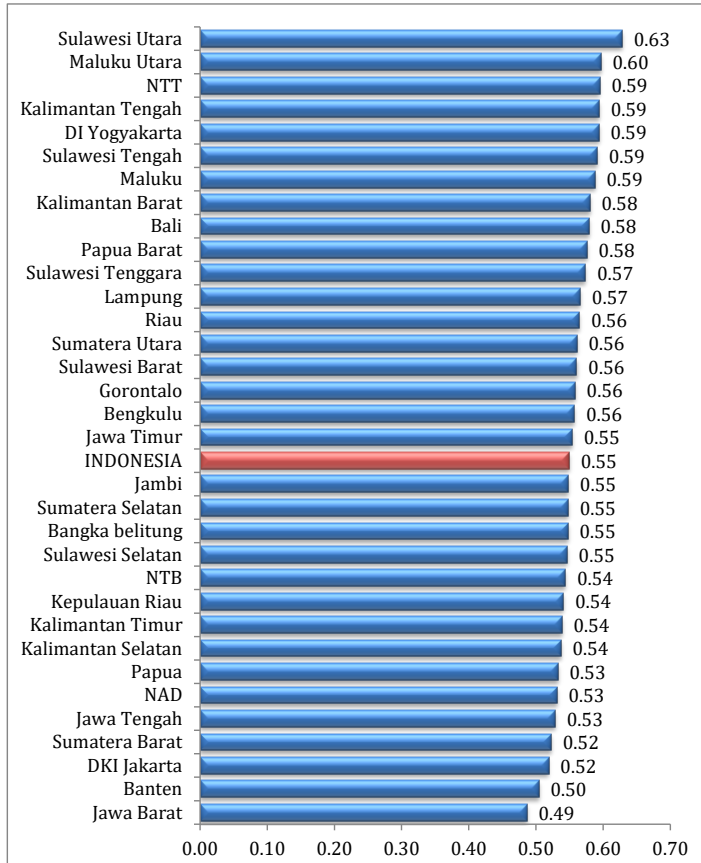
Indikator	2014* (Baseline)	2019
<b>Pembangunan Manusia dan Masyarakat</b>		
▪ Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,83	76,3
▪ Indeks Pembangunan Masyarakat <sup>1</sup>	0,55	Meningkat
▪ Indeks Gini	0,41	0,36
▪ Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	51,8% (Oktober 2014)	Min. 95%
▪ Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan		
1. Pekerja formal	29,5 juta	62,4 juta
2. Pekerja informal	1,3 juta	3,5 juta
▪ Pertumbuhan ekonomi	5,1%	8,0 %
▪ PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010	43.403	72.217
▪ PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000	40.785	
▪ Tingkat Kemiskinan	10,96 % *)	7,0-8,0%
▪ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,94%	4,0-5,0%

1) **Indeks Pembangunan Masyarakat** merupakan indeks komposit yang mengukur sifat kegotongroyongan, toleransi, dan rasa aman masyarakat

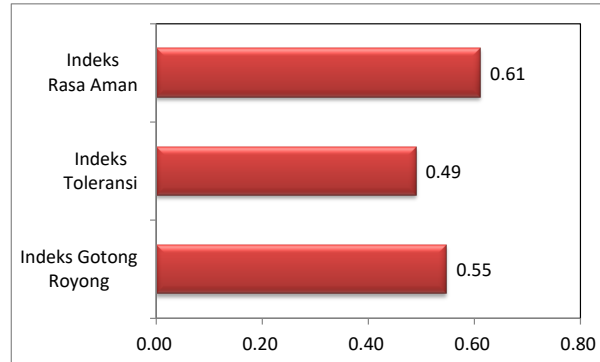
\*) Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada Bulan November 2014

# Indeks Pembangunan Masyarakat

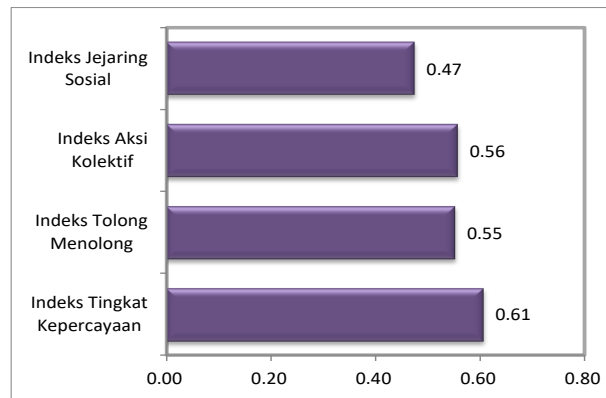
Indeks Pembangunan Masyarakat, 2012



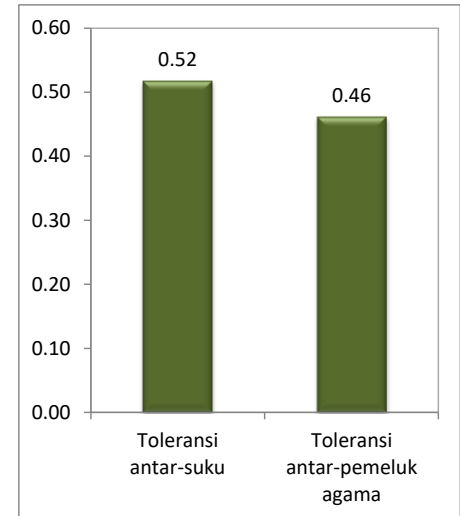
Dimensi Indeks Pembangunan Masyarakat, 2012



Dimensi Indeks Gotong Royong, 2012



Indeks Toleransi, 2012



**Indeks Pembangunan Masyarakat** merupakan indeks komposit yang mengukur:

1. Indeks gotong-royong (mengukur modal sosial → kepercayaan kepada lingkungan tempat tinggal, kemudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan bakti sosial, serta jejaring sosial)
2. Indeks toleransi (mengukur kohesi sosial → toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal)
3. Indeks rasa aman (mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal)

# Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Aceh

## **PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG**

1. Pembangunan Jalur KA Banda Aceh-Lhokseumawe
2. Pembangunan jalur KA Banda Lhokseumawe-Langsa-Besitang
3. Pembangunan jalur KA antara Bireun - Lhokseumawe
4. Pembangunan jalur KA antara Sigli - Bireun (tahap 1)

## **PERHUBUNGAN DARAT**

1. Revitalisasi Kawasan Terminal di Banda Aceh (Keudah dan Peunayong)

## **PERHUBUNGAN UDARA**

1. Pengembangan Bandara Sultan Iskandar Muda
2. Pengembangan Bandara Maimun Saleh, Sabang
3. Peningkatan Bandara Lasikin
4. Peningkatan Bandara Gayo Lues
5. Peningkatan Bandara Rambele
6. Peningkatan Bandara Cut Nyak Dhien
7. Peningkatan Bandara T.Cut Ali

# Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Aceh

## PERHUBUNGAN LAUT

1. Pembangunan dan Perluasan Pelabuhan Krueng Geukuh
2. Pengembangan Pelabuhan Sabang
3. Pembangunan Pelabuhan Malahayati Banda Aceh\*
4. Pembangunan Pelabuhan Susuh di Teluk Surin Aceh Barat Daya
5. Pengembangan Pelabuhan Kuala Langsa
6. Pengembangan Pelabuhan Singkil

## JALAN

1. Pembangunan Jalan Kruengraya-Tibang
2. Pembangunan Jalan Gempang - Pameuh
3. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Simelue
4. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Weh (Sabang - Keuneukal)
5. Pembangunan Jalan Takengon-Sp.Peut

## ENERGI

1. Revitalisasi kilang LNG Arun 400 mmscfd

# Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Aceh

## **ASDP**

1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Meulaboh\*
2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sinabang
3. Pengembangan Dermaga Penyeberangan P.Banyak

## **KETENAGALISTRIKAN**

1. PLTGU/MGU Sumbagut-2 Peaker (Arun) 250 MW
2. PLTU Meulaboh #3 200 MW
3. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi

## **TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI

## **SUMBER DAYA AIR**

1. Pembangunan Waduk Jambo Aye Kab. Aceh Utara & Timur
2. Pembangunan Waduk Kreuto Aceh Utara
3. Pembangunan Waduk Rukoh & Tiro Pidie
4. Pembangunan Waduk Lawe Mamas I Aceh Tenggara
5. Pembangunan Waduk Lawe Atas Aceh Tenggara

# Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Aceh

6. Pembangunan Waduk Lawe Mamas II Aceh Tenggara
7. Integrated Participatory Development and Management Lhok Guci Irrigation Aceh Jaya
8. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Kr. Pase Aceh Utara
9. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Kanan Aceh Utara
10. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Jamuan (*extension*) Aceh Utara
11. Pembangunan Bendung D.I. Peureulak Aceh Timur
12. Pembebasan Lahan D.I. Peureulak & D.I. Lhok Guci Aceh Timur dan Aceh Jaya
13. Pembangunan Prasarana Pengendalian Daya Rusak Air Sungai Kr. Singkil Aceh Singkil - Kota Subulussalam
14. Pengendalian Banjir Sungai Lawe Bulan Aceh Singkil
15. Pengamanan Pantai Permukiman Kota Meulaboh Aceh Barat
16. Pengamanan Muara Krueng Peudada Bireun
17. Pembangunan Pengamanan Pantai krueng Raya kec. Masjid Raya Aceh Besar
18. Pembangunan Intake & Pipa Transmisi Air Baku di Kab. Aceh Utara
19. Pembangunan Intake & Pipa Transmisi Air Baku Aceh Singkil
20. Pembangunan Intake & Pipa Transmisi Air Baku Nagan Raya

# Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Aceh

21. RESTORASI SUNGAI Sungai Lawe Alas Dan Lawe Bulan A. Tenggara & Aceh Singkil
22. RESTORASI SUNGAI Sungai Kr. Baro. Kr. Tiro Dan Krueng Aceh Aceh Besar, Pidie dan Pidie Jaya

## **PENDIDIKAN**

1. Science Park Berbasis Kebencanaan di Kota Banda Aceh
2. Techno Park berbasis komoditas kopi (di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meria) dan kakao (Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya).
3. Techno Park berbasis lobster dan udang di kabupaten Simeulue
4. Penambahan 2 rumah budaya

## **KESEHATAN**

1. Peningkatan kapasitas RS regional (6 RS)
2. Peningkatan fasilitas kesehatan dasar (puskesmas baru, rehabilitasi puskesmas, pusling)
3. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan
4. Pemenuhan kebutuhan obat dan vaksin



# Kerangka Ekonomi Makro 2016



# Sasaran dan Asumsi Makro

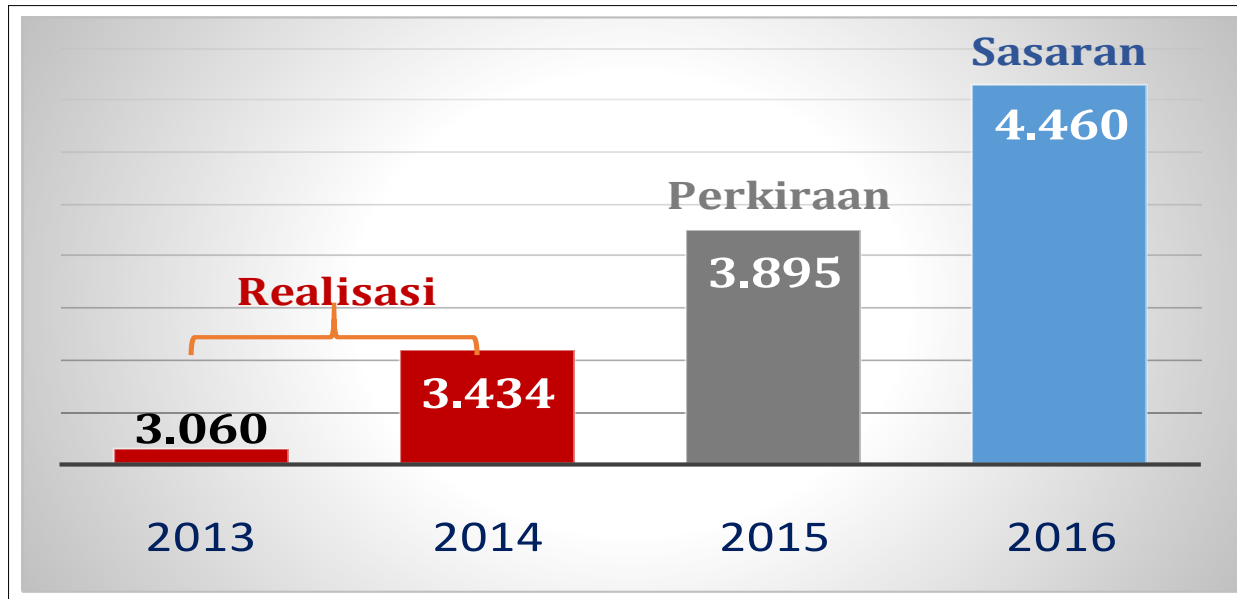
Indikator	2015		2016	
	RPJMN	APBN-P	RPJMN	RKP
Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)	5,8	5,7	6,6	6,6
Inflasi (% , yoy)	5,0	5,0	4,0	4,0
Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)	6,2	6,2	6,0	5,0
Nilai tukar (Rp/US\$)	12.200	12.500	12.150	12.600
Harga Minyak Mentah (US\$/barell)	70,0	60	85,0	65
Lifting Minyak (ribu barell per hari)	849,0	825	880,0	830
Lifting Gas (MBOEPD)	1.177	1.221	1.150,0	1.150

# Rincian Pertumbuhan PDB (%)

SISI PENGELUARAN	2011	2012	2013	2014	2015	2016
					Perkiraan	Sasaran
Pertumbuhan Ekonomi	6,2	6,0	5,6	5,0	5,7	6,6
Konsumsi Rumah Tangga	5,1	5,5	5,4	5,1	5,1	5,3
Konsumsi LNPRT	5,5	6,7	8,2	12,4	3,5	5,0
Konsumsi Pemerintah	5,5	4,5	6,9	2,0	4,5	1,4
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	8,9	9,1	5,3	4,1	8,5	10,3
Ekspor Barang dan Jasa	14,8	1,6	4,2	1,0	2,2	5,0
Impor Barang dan jasa	15,0	8,0	1,9	2,2	1,6	4,5

SISI PRODUKSI	2011	2012	2013	2014	2015	2016
					Perkiraan	Sasaran
Pertanian	4,0	4,6	4,2	4,2	4,2	4,3
Pertambangan dan Penggalian	4,3	3,0	1,7	0,6	0,6	0,8
Industri Pengolahan	6,3	5,6	4,5	4,6	6,1	6,9
Lainnya	7,1	7,1	7,1	6,2	6,7	7,9
Pertumbuhan Ekonomi	6,2	6,0	5,6	5,0	5,7	6,6

# Kebutuhan Investasi 2016 (Rp Triliun)



Pertumbuhan ekonomi 6,6% di tahun 2016 membutuhkan investasi Rp 4.460 Triliun (85,5% swasta), dengan sumber pendanaan swasta berasal dari kredit perbankan, saham, dan obligasi yang makin membesar perannya.

# Penyusunan RKP 2016



# Rancangan Tema RKP 2016

## NORMA PEMBANGUNAN

- 1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;
- 2) Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar;
- 3) Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan.
- 4) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

## 3 DIMENSI PEMBANGUNAN

### DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

Mental / Karakter

### DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan

Kemaritiman dan Kelautan

Pariwisata dan Industri

### DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

Antarkelompok Pendapatan

Antarwilayah:

- (1) Desa,
- (2) Pinggiran,
- (3) Luar Jawa,
- (4) Kawasan Timur

## KONDISI PERLU

Kepastian dan Penegakan Hukum

Keamanan dan Ketertiban

Politik & Demokrasi

Tata Kelola & RB

## QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

### RKP 2015

MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN

### RKP 2016

MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MELETAKKAN FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS

### RKP 2017

Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2017

### RKP 2018

Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2018

### RKP 2019

Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019

# Rancangan Tema RKP 2016

## Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas

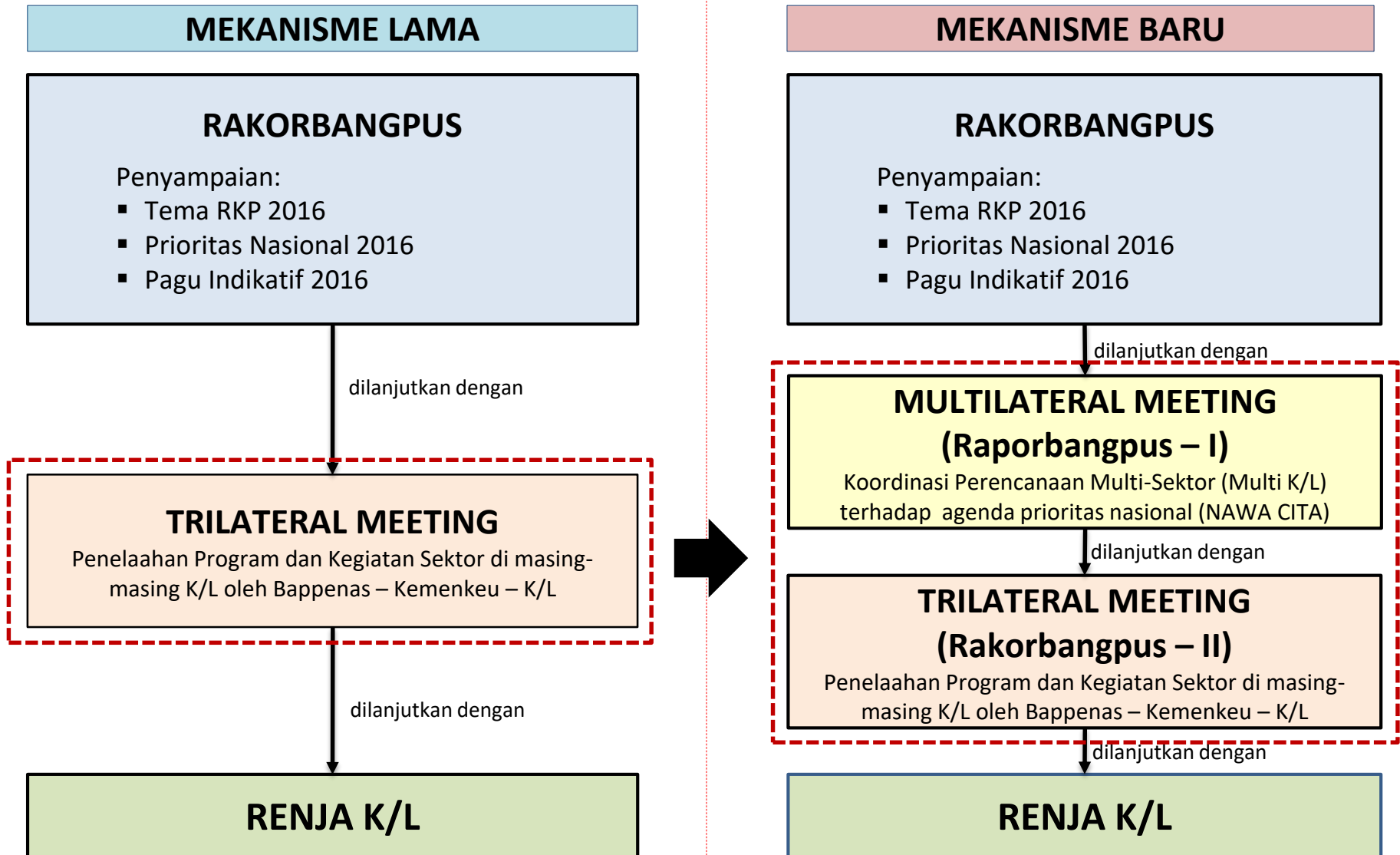
- ❑ Salah satu permasalahan utama yang **menghambat percepatan realisasi investasi saat ini adalah adanya keterbatasan infrastruktur**, termasuk pasokan listrik.
- ❑ Pemenuhan **ketersediaan infrastruktur** merupakan salah satu **prasyarat utama** yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas.
- ❑ Pembangunan berkualitas adalah:
  - Membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas, dan tidak boleh memperlebar ketimpangan antar golongan dan antar wilayah.
  - Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Menghasilkan pertumbuhan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan
- ❑ Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk **mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri** dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang memperhatikan pemerataan.

# Arahan Penyusunan RKP 2016

1. Prioritas program/kegiatan pembangunan difokuskan untuk pencapaian target/sasaran Agenda Prioritas Nasional (NAWA CITA) pada RPJMN 2015-2019.
2. Usulan program/kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif dalam kerangka pembangunan wilayah sesuai dengan arah pembangunan wilayah per pulau/provinsi pada RPJMN 2015-2019. Usulan program/kegiatan perlu dilakukan secara terpadu dan terintegrasi, baik lintas sektor, lintas K/L, maupun lintas wilayah.
3. Selama ini, pembahasan Program/Kegiatan serta pengalokasian Pagu Indikatif dilakukan secara sektoral per Kementerian/Lembaga.
4. Padahal, banyak sasaran/target program di K/L sektor yang memerlukan dukungan kegiatan dari K/L lain, namun K/L yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan utk mengkoordinasikan K/L lain.
5. Hanya Kementerian PPN/Bappenas yang mempunyai fungsi utama sebagai koordinator perencanaan lintas sektor, lintas wilayah, maupun lintas kementerian/lembaga.
6. Di Era Kabinet Kerja (Jokowi-JK), sebagian besar Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA) bersifat Lintas Sektor, Lintas Kementerian dan Lintas Wilayah, sebagai contoh pariwisata, kedaulatan pangan, dan kemaritiman. Oleh karena itu, sangat diperlukan koordinasi perencanaan program/kegiatan lintas sektor/lintas K/L dan lintas wilayah.
7. Untuk itu, pelaksanaan Rakorbangpus 2015 terbagi menjadi 2 tahap, yaitu:
  - a. Rakorbangpus Tahap I dilakukan pembahasan agenda prioritas nasional secara lintas sektor/lintas Kementerian/Lembaga dan lintas wilayah (*Multilateral Meeting*).
  - b. Rakorbangpus Tahap II dilakukan:
    - i. pendalaman hasil pembahasan Rakorbangpus Tahap I; dan
    - ii. pembahasan usulan program/kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga yang bersangkutan (*Trilateral Meeting*).



# Mekanisme Rakorbangpus



# Multilateral Meeting

- Koordinasi Perencanaan Multilateral/Multi-Sektor/Multi K/L terhadap masing-masing **Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA)** meliputi:
  1. Kedaulatan pangan
  2. Kedaulatan energi
  3. Kemaritiman
  4. Industri/Kawasan Industri
  5. Pariwisata
  6. Revolusi mental
  7. Kawasan Perbatasan
- Masing-masing agenda prioritas nasional tersebut dibahas bersama K/L terkait dalam forum lintas sektor dan lintas K/L terkait.

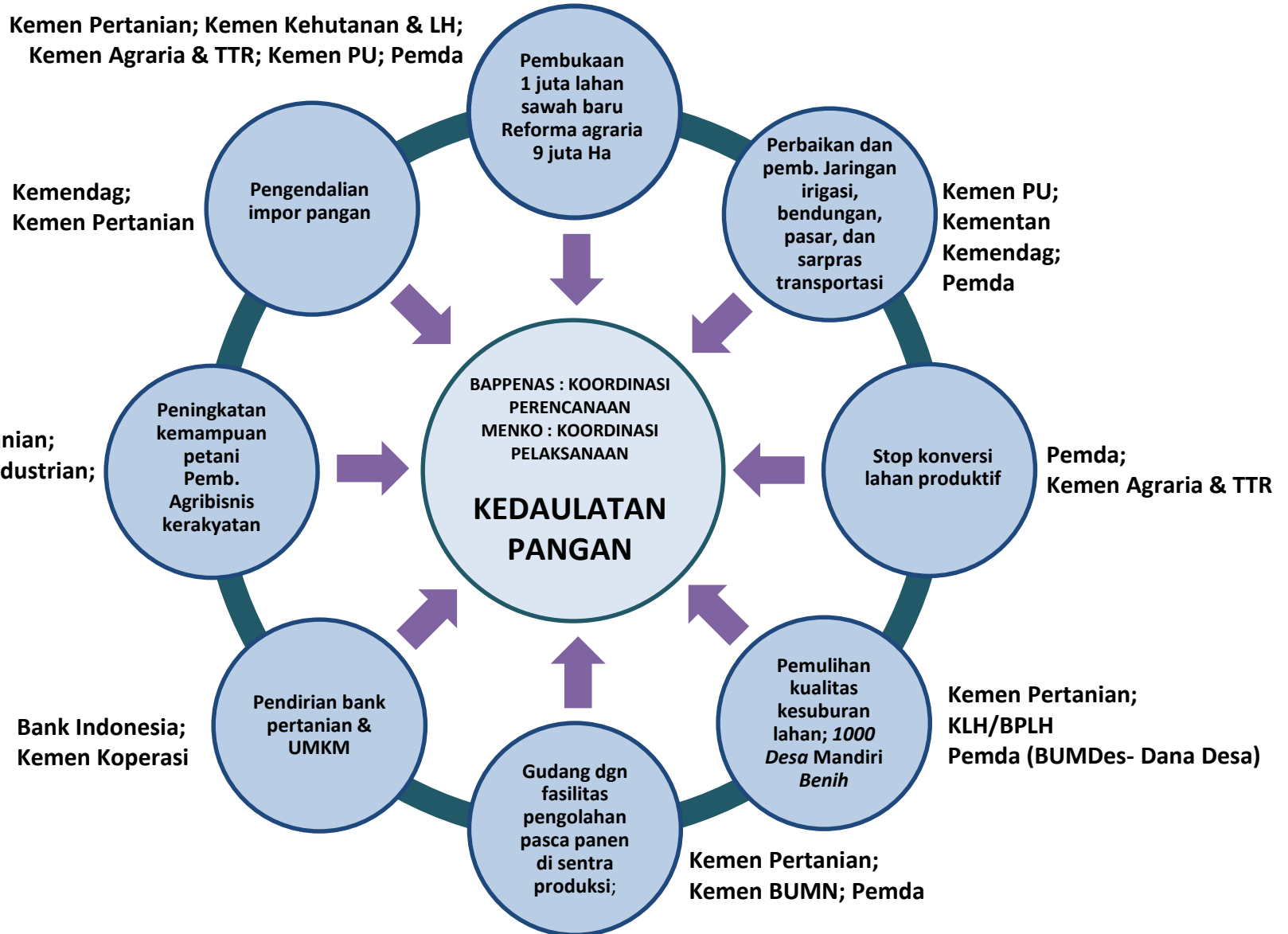




# Koordinasi Agenda Prioritas Nasional



# 1. Kedaulatan Pangan



# 1. Kedaulatan Pangan

Sasaran yang ingin dicapai 5 tahun ke depan adalah:

1. Pembukaan 1 juta ha lahan sawah baru
2. Pembukaan pertanian lahan kering 1 juta ha di luar Jawa
3. Perbaikan/pembangunan irigasi untuk 3 juta ha lahan sawah
4. Pembangunan pasar
5. Pembangunan sarana prasarana transportasi
6. Stop konversi lahan produksi
7. Pemulihan kesuburan lahan (1000 desa mandiri benih)
8. Gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen
9. Bank pertanian dan UMKM
10. Peningkatan kemampuan pertanian
11. Pembangunan agribisnis kerakyatan
12. Pengendalian impor pangan
13. Reforma agraria 9 juta ha

## **Pembukaan 1 Juta Ha Sawah Baru**

- Untuk pembahasan 1 juta ha sawah baru, fokus pembahasan antara lain:
  1. Penyebaran lokasi per provinsi
  2. Kesiapan Kementerian Pertanian
  3. Alih fungsi lahan ke pertanian
  4. Dukungan dari Direktorat lain di Bappenas dan juga KL lain selain Kementerian Pertanian
  5. dll

## **Irigasi untuk 3 Juta Ha Sawah**

- Untuk pembahasan perbaikan/pembangunan irigasi untuk mengairi 3 juta ha sawah, fokus pembahasan antara lain:
  1. Lokasi waduk per provinsi
  2. Kesiapan Kementerian PU dan Pera
  3. Dukungan dari Pemerintah Daerah
  4. Dukungan dari Direktorat lain di Bappenas dan juga KL lain selain Kementerian Pertanian,
  5. dll

# 1. Kedaulatan Pangan

SASARAN NAWACITA	KEMENTERIAN/LEMBAGA
1. Pembukaan 1 Juta Ha Lahan sawah baru	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang 3. Kementerian Kehutanan dan LH 4. Kementerian PU dan Pera
2. Pembukaan pertanian lahan kering 1 juta Ha di luar Jawa	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang 3. Kementerian Kehutanan dan LH 4. Kementerian PU dan Pera
3. Perbaikan/pembangunan irigasi untuk 3 juta lahan sawah	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang 3. Kementerian Kehutanan dan LH 4. Kementerian PU dan Pera
4. Pembangunan pasar	1. Kementerian Perdagangan 2. Kementerian Perindustrian 3. Kementerian PU&Pera
5. Pembangunan sarana prasarana transportasi	1. Kementerian PU&Pera
6. Stop konversi lahan produktif	1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
7. Pemulihan kesuburan lahan (1000 Desa mandiri benih)	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Kehutanan dan LH
8. Gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen	1. Kementerian Pertanian
9. Bank pertanian dan UMKM	1. Kementerian Koperasi dan UKM
10. Peningkatan kemampuan petani	1. Kementerian Pertanian
11. Pembangunan agribisnis kerakyatan	1. Kementerian Pertanian
12. Pengendalian impor pangan	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Perdagangan
13. Reforma agraria 9 Juta Ha	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Kehutanan dan LH 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang

# Sasaran Nawacita berdasarkan Program K/L

AGENDA NAWACITA:

VII. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK

SUB AGENDA PRIORITAS:

KEDAULATAN PANGAN

TAHUN:

2016

KETUA FORUM:

DEPUTI SDA-LH

OBSERVER:

1. KEMENTERIAN PEREKONOMIAN  
2. KANTOR STAF KEPRESIDENAN

SASARAN NAWACITA	INSTANSI PELAKSANA (K/L/BUMN/DAK)	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2016	INDIKATOR KEGIATAN	ALOKASI (RP. JUTA)	KERANGKA REGULASI
1. Pembukaan 1 Juta Ha Lahan sawah baru	Kementerian Pertanian	Program Kegiatan 1 Kegiatan 2				
	Kemen. Agraria & Tata Ruang	Program Kegiatan 1 Kegiatan 2				
	Kementerian Kehutanan dan LH	Program Kegiatan 1 Kegiatan 2				
	Kementerian PU dan Pera	Program Kegiatan 1 Kegiatan 2				
2. Pembukaan pertanian lahan kering 1 juta Ha di luar Jawa	Kementerian Pertanian	Program Kegiatan 1 Kegiatan 2				
	Kemen. Agraria & Tata Ruang	Program Kegiatan 1 Kegiatan 2				
	Kementerian Kehutanan dan LH	Program Kegiatan 1 Kegiatan 2				
	Kementerian PU dan Pera	Program Kegiatan 1 Kegiatan 2				



# Sasaran Nawacita berdasarkan Lokasi

**AGENDA NAWACITA:**

**VII. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN  
MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI  
DOMESTIK**

**SUB AGENDA PRIORITAS:**

**KEDAULATAN PANGAN**

**KEMENTERIAN/LEMBAGA:**

**KEMENTERIAN PERTANIAN**

**PROGRAM STRATEGIS:**

**PROGRAM A**

**KEGIATAN STRATEGIS:**

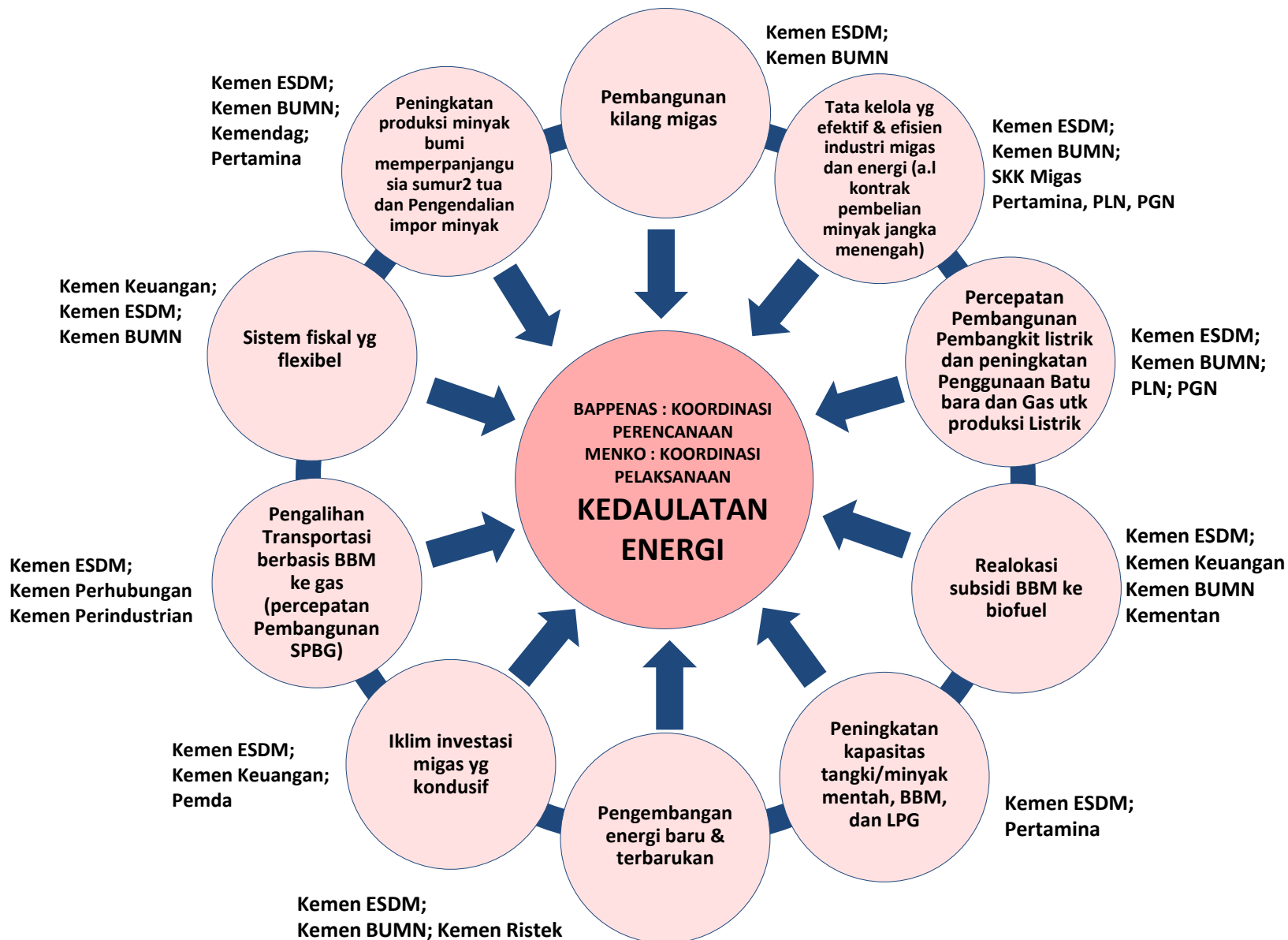
**KEGIATAN A.1**

SASARAN NAWACITA		PROVINSI	TARGET 2016	ALOKASI 2016 (RP.JUTA)
1.	Pembukaan 1 Juta Ha Lahan sawah baru	1. Kalimantan Barat 2. Gorontalo 3. Sumatera Selatan 4. Jawa Barat 5. Papua		
2.	Pembukaan pertanian lahan kering 1 juta Ha di luar Jawa	1. Kalimantan Selatan 2. Sulawesi Barat 3. Sumatera Utara 4. Sulawesi Tengah 5. Papua Barat		
3.	Dst...			

# Forum Kedaulatan Pangan

Sasaran Nawacita	Kementerian/Lembaga					
	Pertanian	Kehutanan & LH	Agraria & TTR	Kemendag	Perindustrian	PU PERA
Pembukaan 1 juta ha lahan sawah baru	v	v	v			v
Pembukaan pertanian lahan kering 1 juta ha di luar Jawa	v	v	v			v
Perbaikan/pembangunan irigasi untuk 3 juta lahan sawah	v	v	v			v
Pembangunan pasar				v	v	v
Pembangunan sarana prasarana transportasi					v	v
Stop konversi lahan produktif			v			
Pemulihan kesubuhan lahan (1000 Desa mandiri benih)	v	v				
Gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen	v					
Bank Pertanian dan UMKM	v					
Peningkatan kemampuan petani	v				v	
Pembangunan agribisnis kerakyatan	v				v	
Pengendalian impor pangan	v			v		
Reforma agraria 9 juta ha	v	v	v			v

# 2. Kedaulatan Energi



## 2. Kedaulatan Energi

Sasaran yang ingin dicapai 5 tahun ke depan adalah:

1. Tata kelola industri migas dan energi
2. Percepatan pembangunan pembangkit listrik
3. Peningkatan penggunaan batu bara dan gas
4. Realokasi subsidi BBM ke biofuel
5. Peningkatan kapasitas tangki
6. Pembangunan energi baru dan terbarukan
7. Iklim investasi migas yang kondusif
8. Pengalihan transportasi berbasis BBM ke gas
9. Sistem fiskal yang fleksibel
10. Peningkatan produksi minyak bumi, memperpanjang sumur tua
11. Pengendalian impor minyak
12. Pembangunan kilang minyak

## Tata Kelola Industri Migas dan Energi

- Untuk sasaran Tata Kelola Industri Migas dan Energi, fokus pembahasan antara lain:
  - Penetapan target dan indikator
  - Inventarisasi stakeholders yang akan terlibat
  - Pembuatan roadmap 5 tahun
  - dll

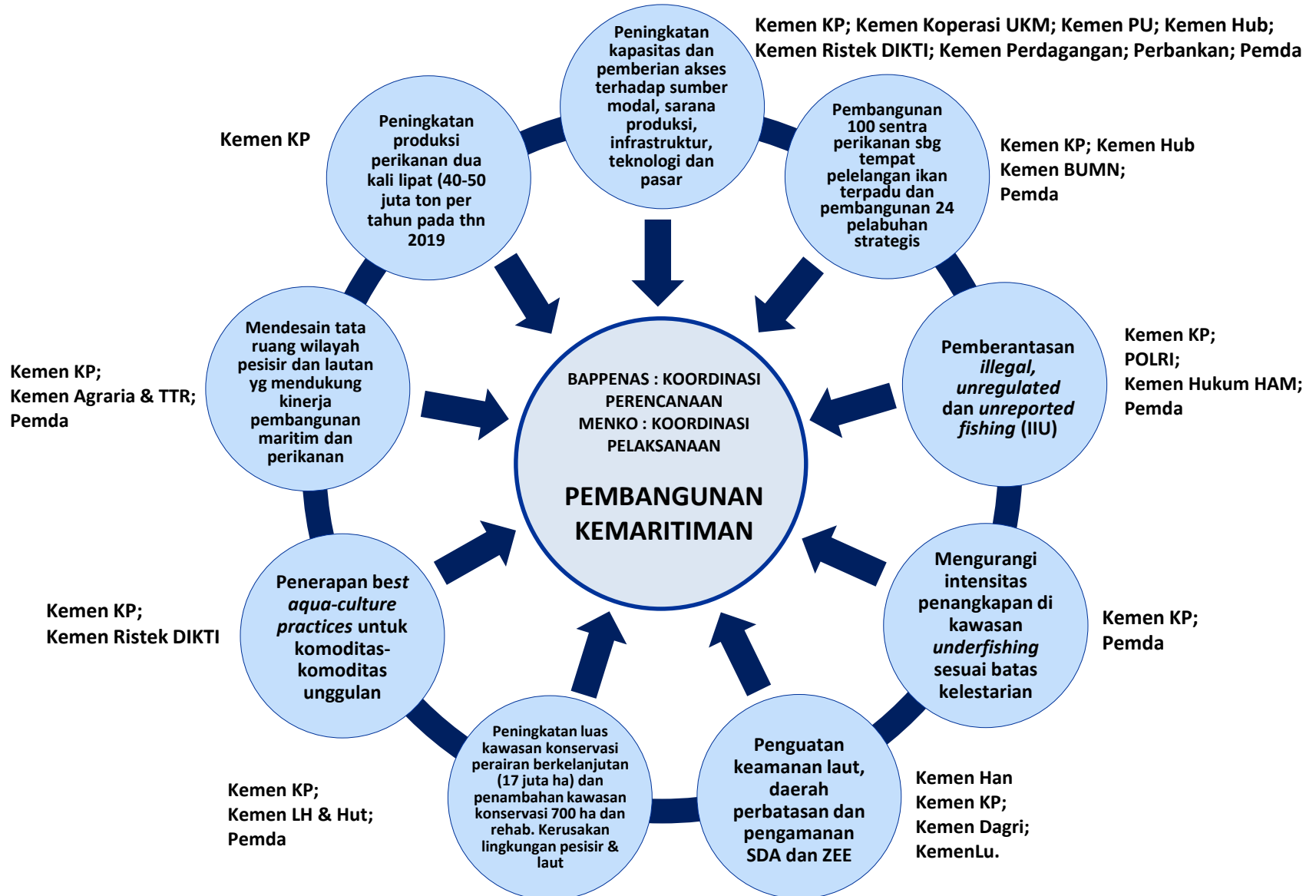
## Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik

- Untuk percepatan pembangunan pembangkit listrik, fokus pembahasan antara lain:
  - Inventarisasi defisit dan kebutuhan listrik per provinsi
  - Kemampuan PLN menyediakan listrik
  - Kebutuhan KPS dalam penyediaan listrik
  - dll

## 2. Kedaulatan Energi

SASARAN NAWACITA		KEMENTERIAN/LEMBAGA
1.	Tata kelola industri migas dan energi	1. Kementerian ESDM 2. Kementerian BUMN
2.	Percepatan pembangunan pembangkit listrik	1. Kementerian ESDM 2. Kementerian BUMN
3.	Peningkatan penggunaan batu bara dan gas	1. Kementerian ESDM 2. Kementerian BUMN
4.	Realokasi subsidi BBM ke Biofuel	1. Kementerian ESDM 2. Kementerian BUMN 3. Kementerian Pertanian
5.	Peningkatan kapasitas tangki	1. Kementerian ESDM
6.	Pembangunan energi baru dan terbarukan	1. Kementerian ESDM 2. Kementerian RISTEK
7.	Iklim investasi migas yang kondusif	1. Kementerian ESDM 2. Kementerian RISTEK 3. Kementerian BUMN
8.	Pengalihan transportasi berbasis BBM ke gas	1. Kementerian ESDM
9.	Sistem fiskal yang fleksibel	1. Kementerian ESDM 2. Kementerian BUMN
10.	Peningkatan produksi minyak bumi, memperpanjang umur sumur tua	1. Kementerian ESDM 2. Kementerian BUMN 3. Kementerian Perdagangan
11.	Pengendalian impor minyak	1. Kementerian ESDM 2. Kementerian BUMN 3. Kementerian Perdagangan
12.	Pembangunan kilang minyak	1. Kementerian ESDM 2. Kementerian BUMN 3. Kementerian Kehutanan dan LH 4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang 5. Kementerian PU&Pera

# 3. Kemaritiman



# 3. Kemaritiman

Sasaran yang ingin dicapai 5 tahun ke depan antara lain adalah:

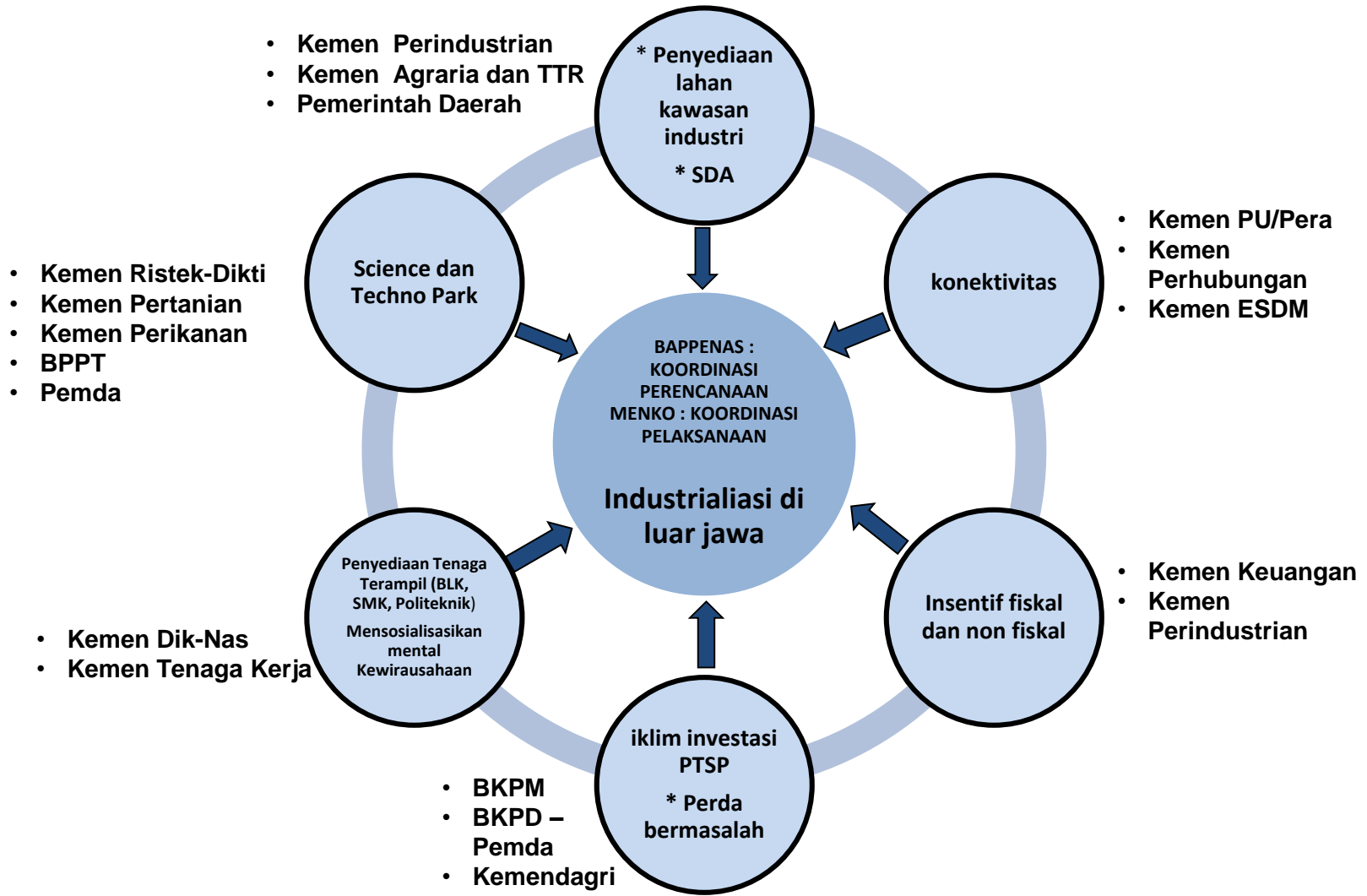
1. Pemberian akses modal, sarpro, infrastruktur, teknologi dan pasar
2. Pembangunan 100 sentra perikanan
3. Pembangunan 24 pelabuhan strategis
4. Pemberantasan illegal, unregulated, unreported fishing
5. Penurunan peningkatan di kawasan overfishing
6. Keamanan laut, daerah perbatasan
7. Pengamanan SDA dan ZEE
8. Kawasan konservasi perairan berkelanjutan 17 juta ha
9. Penambahan kawasan konservasi 700 ha
10. Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir
11. Best aqua-culture practices untuk komoditas unggulan
12. Mendesain tata ruang wilayah pesisir dan laut
13. Peningkatan produksi perikanan (40-50 juta ton pertahun di 2019)



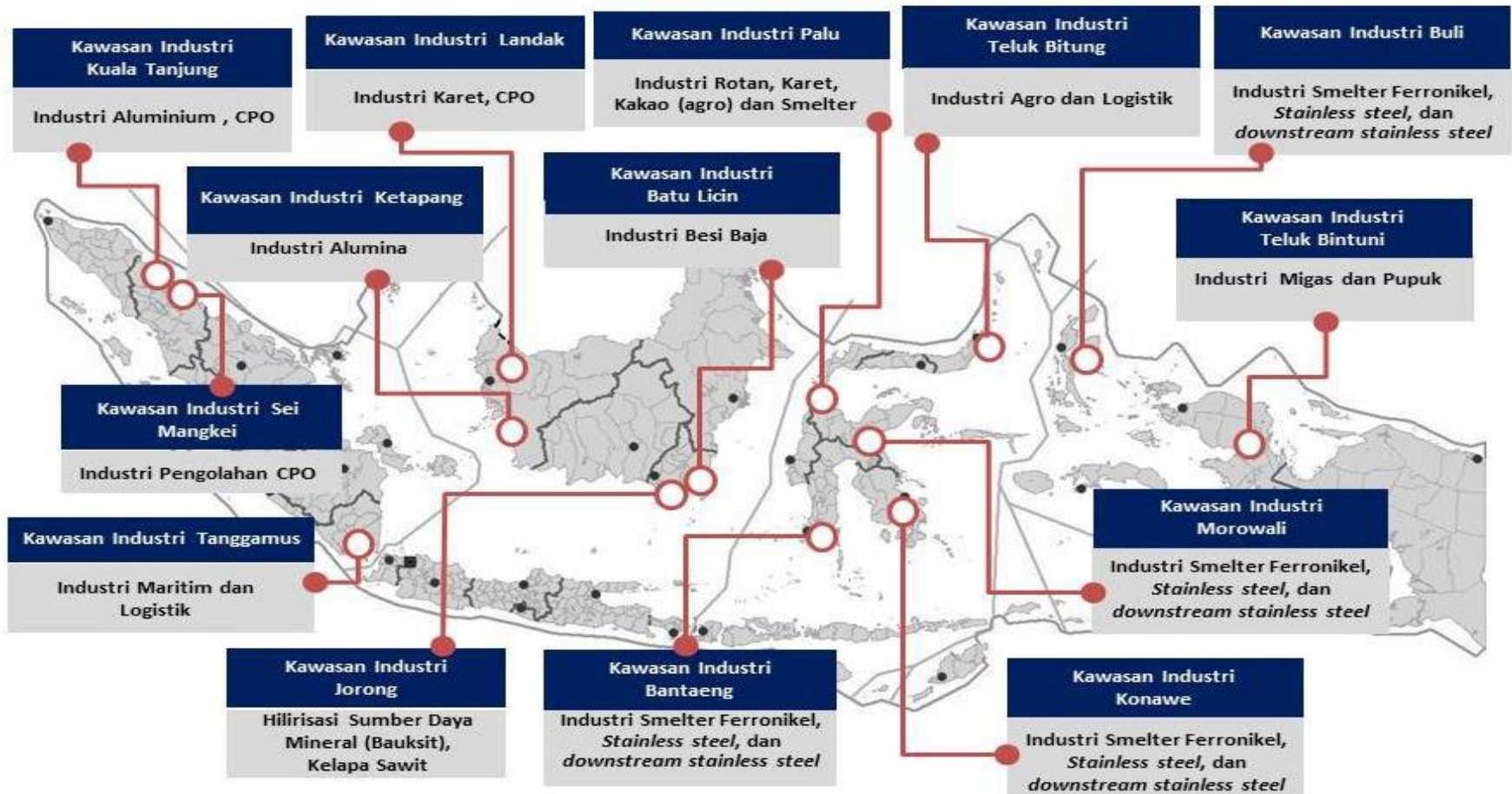
# 3. Kemaritiman

SASARAN NAWACITA	KEMENTERIAN/LEMBAGA
1. Pemberian akses modal, sarpro, infrastruktur, teknologi dan pasar	1. Kementerian Kelautan Perikanan 2. Kementerian Koperasi dan UKM 3. Kementerian PU dan PERA 4. Kementerian Perhubungan 5. Kementerian Ristek DIKTI 6. Kementerian Perdagangan 7. Perbankan
2. Pembangunan 100 sentra perikanan	1. Kementerian Kelautan Perikanan 2. Kementerian Perhubungan
3. Pembangunan 24 pelabuhan strategis	1. Kementerian BUMN 2. Kementerian Kelautan Perikanan 3. Kementerian Perhubungan
4. Pemberantasan illegal unregulated, unreported fishing	1. Kementerian Kelautan Perikanan 2. POLRI 3. Kementerian Hukum dan HAM
5. Penurunan peningkatan kawasan overfishing	1. Kementerian Kelautan Perikanan
6. Keamanan laut, daerah perbatasan dan pengamanan SDA dan ZEE	1. Kementerian Pertahanan 2. Kementerian Kelautan Perikanan 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Kementerian Luar Negeri
7. Kawasan konservasi perairan berkelanjutan 17 juta ha	1. Kementerian Kelautan Perikanan 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8. Penambahan kawasan konservasi 700 ha	1. Kementerian Kelautan Perikanan 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9. Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir	1. Kementerian Kelautan Perikanan 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10. Best aqua-culture practices untuk komoditas unggulan	1. Kementerian Kelautan Perikanan 2. Kementerian Ristek DIKTI
11. Mendesain tata ruang wilayah pesisir dan laut	1. Kementerian Kelautan Perikanan 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
12. Peningkatan produksi perikanan (40-50 juta ton pertahun di 2019)	1. Kementerian Kelautan Perikanan

# 4. Pembangunan KI dan KEK



# Contoh Lintas Sektor: Pembangunan Kawasan Industri

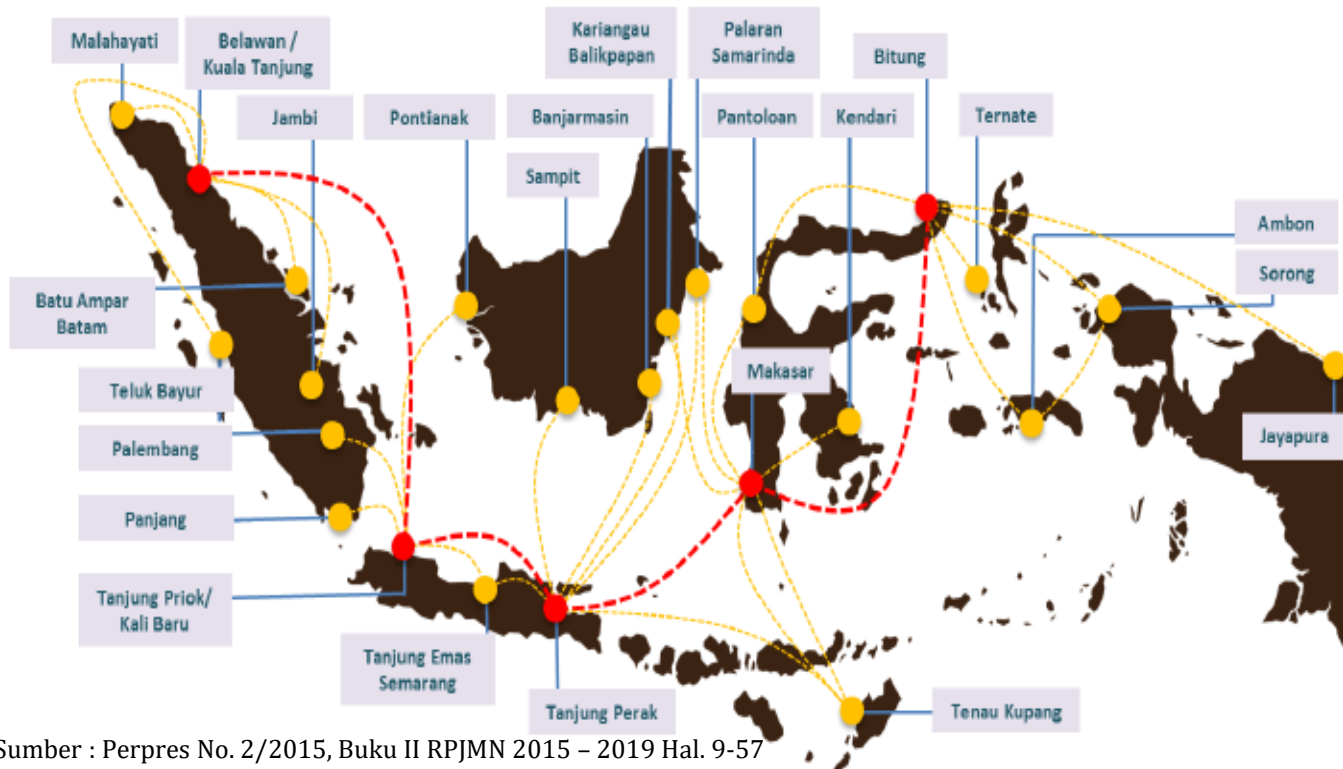


Sumber: Perpres No. 2/2015, Buku I RPJMN 2015 – 2019 Hal. 6.128

## Perlu diperdalam detail pelaksanaan pembangunan kawasan industri a.I :

- Roadmap pemb kawasan industri (detail lokasi dan keterkaitan antar lokasi pemb kaw industri satu dengan lainnya)
- Tahapan pelaksanaan
- Kebutuhan pendanaan dan pembagian kewenangan instansi yang terlibat. Mis :
  - Listrik, jalan, lahan, dsb
  - Kejelasan regulasi dan kelembagaan yang dibutuhkan

# Contoh Lintas Sektor: Pembangunan Kelautan dan Kemaritiman



## Kerangka Regulasi Tol Laut:

- 1 Penyediaan fasilitas kredit lunak untuk pengadaan kapal nasional
- 2 Pembiayaan melalui DAK untuk pengadaan kapal pelayaran rakyat
- 3 Penyesuaian peraturan bebas bea masuk, PPN, PPh industri galangan kapal dan industri penunjangnya
- 4 Aturan yang lebih fleksibel tentang jaminan penjaminan bank dengan menggunakan kapal
- 5 Penyesuaian Permenhub 7/2013 tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi untuk menekan biaya pembangunan kapal
- 6 Peningkatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) industri kapal nasional sebesar (kapal baru) 40%

Sumber : Perpres No. 2/2015, Buku II RPJMN 2015 – 2019 Hal. 9-57

Keterangan Program	Nilai (Rp.Milyar)	Keterangan
24 Pelabuhan Strategis	243,696	Termasuk pengerukan, pengembangan terminal kontainer, serta lahannya
Short sea shipping	7,500	Kapal, pelabuhan Panjang, sumur, Bojanegara, Kendal, Pacitan, Cirebon
Fasilitas kargo umum dan bulk	40,615	Rencana induk pelabuhan nasional
Pengembangan pelabuhan non-komersil	198,100	1.481 pelabuhan
Pengembangan pelabuhan komersil lainnya	41,500	83 pelabuhan
Transportasi multimoda untuk mencapai pelabuhan	50,000	Jalan akses, kereta pelabuhan, kereta pesisir.
Revitalisasi industri galangan kapal	10,800	12 galangan kapal
Kapal untuk 5 tahun ke depan	101,740	Kapal container, barang perintis, bulk carrier, tug & barge, tanker, dan kapal rakyat
Kapal patroli	6,048	Kapal patrol dari Kelas IA s/d V
<b>Total</b>	<b>699,999</b>	

## Perlu diperdalam detail pelaksanaan pembangunan sistem tol laut :

- Roadmap pembangunan tol laut
- Tahapan pelaksanaan
- Kebutuhan pendanaan dan pembagian kewenangan instansi yang terlibat. Mis :
  - Listrik, jalan, lahan, dsb
  - Kejelasan regulasi dan kelembagaan yang dibutuhkan

# 4. Industri/Kawasan Industri

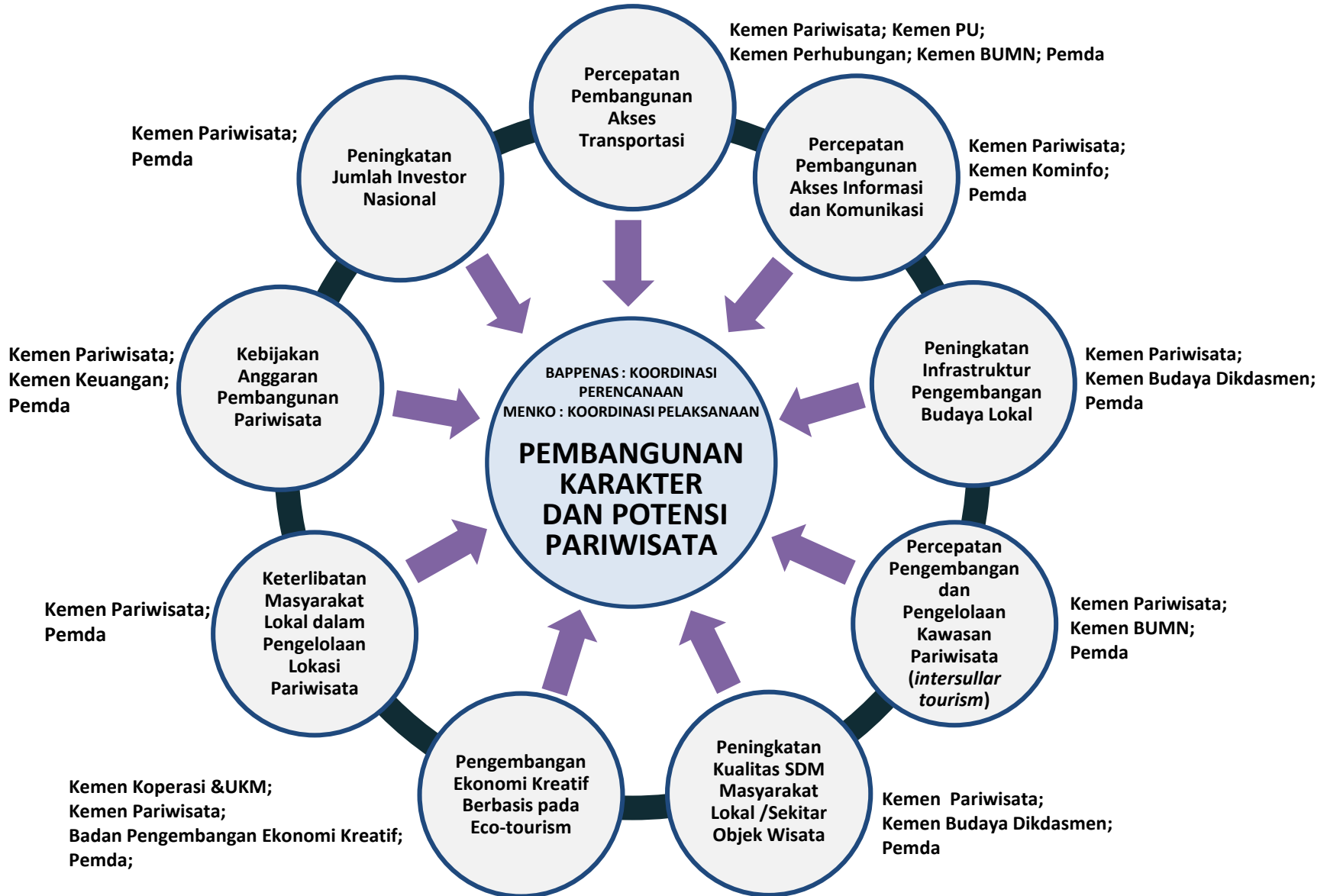
Sasaran yang ingin dicapai 5 tahun ke depan antara lain adalah:

1. Penyediaan lahan kawasan industri
2. Ketersediaan SDA
3. Konektivitas: jalan, pelabuhan laut, bandara
4. Ketersediaan energi, air
5. Insentif fiskal dan non fiskal
6. Iklim investasi (PTSP)
7. Perda-perda bermasalah
8. Penyediaan TK terampil
9. Sosialisasi mental kewirausahaan
10. Science dan Techno Park

## 4. Industri/Kawasan Industri

SASARAN NAWACITA	KEMENTERIAN/LEMBAGA/BUMN
1. Penyediaan Lahan Kawasan Industri	1. Kementerian Perindustrian 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
2. Ketersediaan SDA	1. Kementerian ESDM 2. Kementerian KLH 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
3. Konektivitas: Jalan, Pelabuhan Laut dan Bandara	1. Kementerian PU/Pera 2. Kementerian Perhubungan
4. Ketersediaan Energi, Air	1. Kementerian ESDM 2. Kementerian PU/Pera
5. Insentif Fiskal dan non fiskal	1. Kementerian Perindustrian
6. Iklim Investasi PTSP	1. Kementerian BKPM
7. Perda-perda Bermasalah	1. Kementerian Dalam Negeri
8. Penyediaan Tenaga Terampil	1. Kementerian Budaya dan DIKDASMEN 2. Kementerian Tenaga Kerja
9. Mensosialisasikan Mental Kewirausahaan	1. Kementerian Budaya dan DIKDASMEN 2. Kementerian Tenaga Kerja 3. Kementerian KUKM
10. Sciene dan Technopark	1. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian Perikanan dan Kelautan 4. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

# 5. Pembangunan Karakter dan Potensi Pariwisata



# 5. Pariwisata

Sasaran yang ingin dicapai 5 tahun ke depan antara lain adalah:

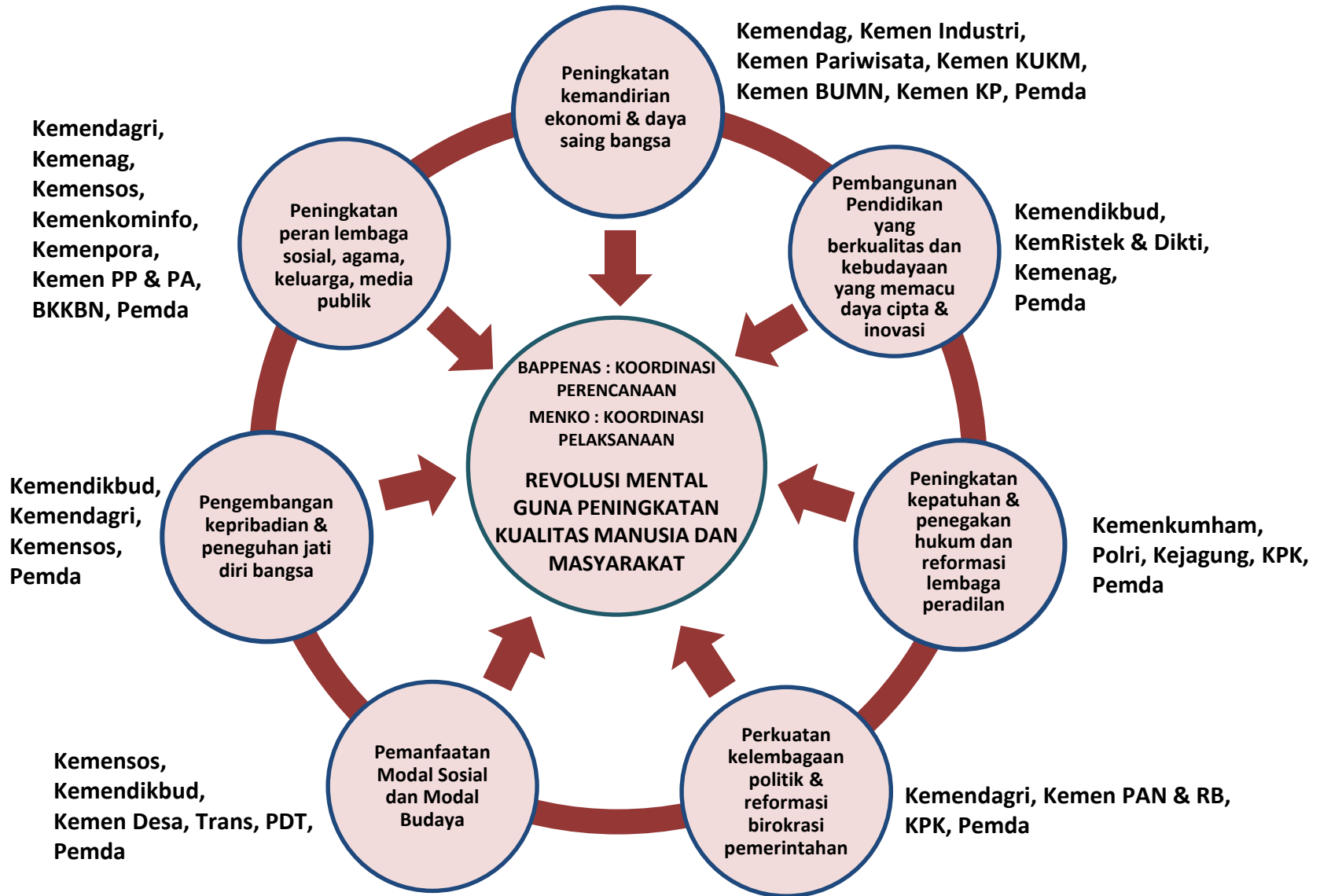
1. Akses transportasi
2. Akses informasi dan komunikasi
3. Pengembangan budaya lokal
4. Pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata
5. Kualitas SDM masyarakat lokal
6. Ekonomi kreatif berbasis eco-tourism
7. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lokasi pariwisata
8. Kebijakan anggaran pembangunan pariwisata
9. Peningkatan jumlah investor nasional



# 5. Pariwisata

SASARAN NAWACITA	KEMENTERIAN/LEMBAGA
1. Akses Transportasi	1. Kementerian PU dan Pera 2. Kementerian Perhubungan
2. Akses Informasi dan Komunikasi	1. Kementerian Kominfo
3. Pengembangan budaya lokal	1. Kementerian Pariwisata 2. Kementerian Budaya Dikdasmen
4. Pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata	1. Kementerian Pariwisata 2. Kementerian BUMN
5. Kualitas SDM masyarakat lokal	1. Kementerian Pariwisata 2. Kementerian Budaya Dikdasmen
6. Ekonomi Kreatif berbasis Eco-Tourism	1. Kementerian Pariwisata 2. Kementerian Koperasi dan UKM 3. Badan Pengembangan Ekonomi Kreatif
7. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan lokasi pariwisata	1. Kementerian Pariwisata
8. Kebijakan anggaran pembangunan pariwisata	1. Kementerian Pariwisata
9. Peningkatan jumlah investor nasional	1. BKPM 2. Kementerian Pariwisata

# 6. Revolusi Mental



## 6. Revolusi Mental

Sasaran yang ingin dicapai 5 tahun ke depan antara lain adalah:

1. Peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa
2. Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan kebudayaan yang memacu daya cipta dan inovasi
3. Peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi pemerintahan
4. Perkuatan kelembagaan politik dan reformasi birokrasi pemerintahan
5. Pemanfaatan modal sosial dan modal budaya
6. Pengembangan kepribadian dan peneguhan jati diri bangsa
7. Peningkatan peran lembaga sosial, agama, keluarga dan media publik

# 6. Revolusi Mental

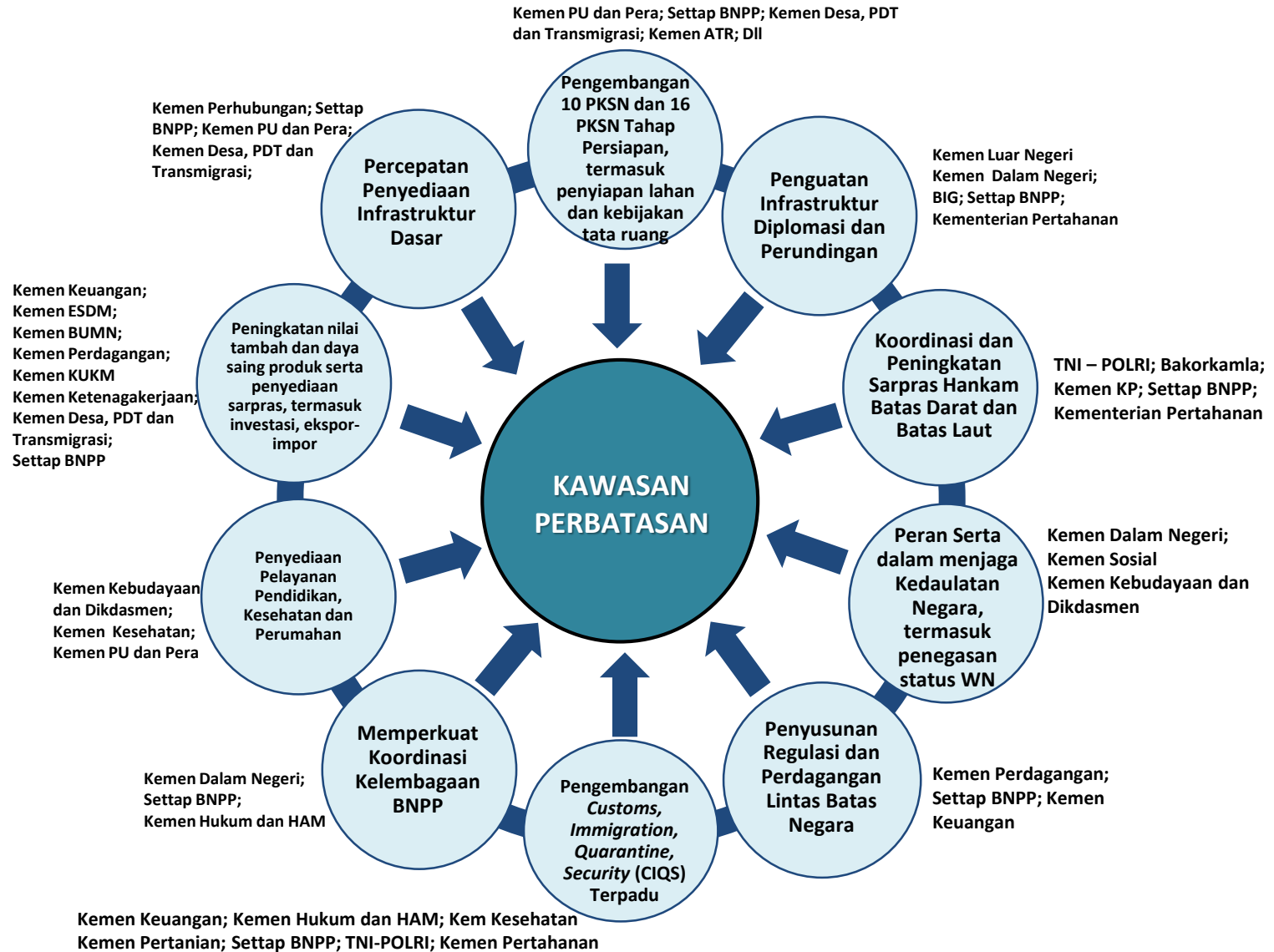
SASARAN NAWACITA	KEMENTERIAN/LEMBAGA/BUMN
1. Peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa	1. Kementerian Perdagangan 2. Kementerian Industri 3. Kementerian Pariwisata 4. Kementerian KUKM 5. Kementerian BUMN 6. Kementerian Kelautan Perikanan
2. Pembangunan Pendidikan yang berkualitas dan kebudayaan yang memacu daya cipta dan inovasi	1. Kementerian Budaya dan DIKDASMEN 2. Kementerian RISTEK dan DIKTI 3. Kementerian Agama
3. Peningkatan Kepatuhan dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	1. Kementerian Hukum dan HAM 2. TNI-POLRI 3. Kejaksaan Agung 4. Komite Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Perkuatan Kelembagaan Politik dan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kejaksaan Agung 3. Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) 4. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
5. Pemanfaatan Modal Sosial dan Modal Budaya	1. Kementerian Budaya dan DIKDASMEN 2. Kementerian Sosial 3. Kementerian Desa , PDT, dan Transmigrasi
6. Pengembangan Kepribadian dan Peneguhan Jati Diri Bangsa	1. Kementerian Budaya dan DIKDASMEN 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Sosial
7. Peningkatan Peran Lembaga Sosial, Agama, Keluarga, Media Publik	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian Agama 3. Kementerian Sosial 4. Kementerian Komunikasi dan Informasi 5. Kementerian Pemuda dan Olah Raga 6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak 7. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

# 7. Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal

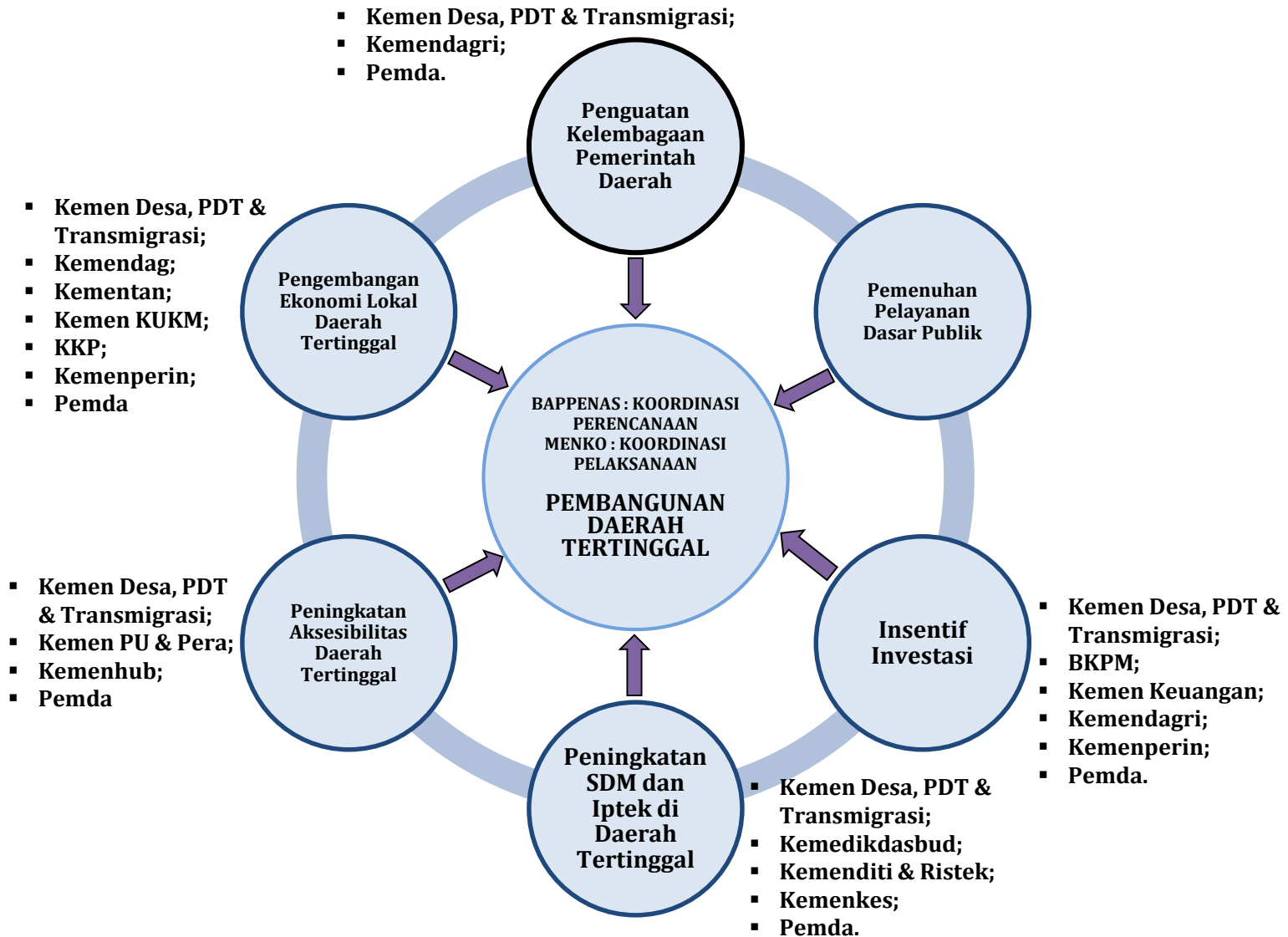
Sasaran yang ingin dicapai 5 tahun ke depan antara lain adalah:

1. Penyiapan lahan dan kebijakan tata ruang
2. Penguatan infrastruktur diplomasi dan perundingan
3. Koordinasi dan peningkatan sarpras Hankam batas darat dan batas laut
4. Peran serta dalam menjaga kedaulatan negara termasuk penegasan status WN
5. Penyusunan regulasi dan perdagangan lintas batas negara
6. Pengembangan Custom, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) Terpadu
7. Memperkuat koordinasi kelembagaan BNPP
8. Penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan dan perumahan
9. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk serta penyediaan sarpras, termasuk investasi, ekspor-impor
10. Pencapaian penyediaan infrastruktur dasar
11. Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
12. Insentif Investasi
13. Peningkatan SDM dan Iptek di Daerah Tertinggal
14. Peningkatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal
15. Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal
16. Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah

# Kawasan Perbatasan



# Pembangunan Daerah Tertinggal



# 7. Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal

SASARAN NAWACITA	KEMENTERIAN/LEMBAGA/BUMN
1. Penyiapan lahan dan kebijakan tata ruang	1. BNPP 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
2. Penguatan Infrastruktur Diplomasi dan Perundingan	1. BNPP 2. Kementrian Luar Negeri
3. Koordinasi dan Peningkatan Sarpras Hankam Batas darat dan Batas Laut	1. Badan Informasi Geospasial 2. Kementrian Pertahanan 3. TNI -POLRI 4. BAKORKAMLA
4. Peran serta dalam menjaga kedaulatan negara, termasuk penegasan status WN	1. Kementerian Dalam Negeri
5. Penyusunan Regulasi dan Perdagangan Lintas Batas Negara	1. Kementerian Perindustrian
6. Pengembangan Custom Imigration,Quarantine,Security (CIQS) Terpadu	1. BNPP 2. Kementerian Pertahanan 3. TNI -POLRI 4. Kementerian Hukum dan HAM 5. Kementerian Keuangan 6. Kementerian Kesehatan 7. Kementerian Pertanian
7. Memperkuat Koordinasi Kelembagaan BNPP	1. BNPP 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Hukum dan HAM
8. Penyedia Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan	1. Kementerian PU dan PERA 2. Kementerian Budaya dan DIKDASMEN 3. Kementerian Kesehatan
9. Peningkatan Nilai tambah dan daya saing produk serta penyediaan sarpras, termasuk investasi,ekspor-impor	1. BNPP 2. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 3. Kementerian Perdagangan 4. Kementerian Ketenagakerjaan 5. Kementerian BUMN 6. Kementerian ESDM 7. Kementerian KUKM



# 7. Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal

SASARAN NAWACITA	KEMENTERIAN/LEMBAGA/BUMN
10. Perecapatan Penyediaan Infrastruktur Dasar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian PU&amp;PERA</li><li>2. Kementerian Perhubungan</li><li>3. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi</li><li>4. BNPP</li></ol>
11. Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kemen Desa, PDT &amp; Transmigrasi;</li><li>2. Kementerian Perhubungan</li><li>3. Kementerian PU dan PERA</li><li>4. Kementerian ESDM</li><li>5. Kementerian Budaya dan DIKDASMEN</li><li>6. Kementerian DIKTI dan RISTEK</li><li>7. Kementerian Kesehatan</li></ol>
12. Insentif Investasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Desa, PDT &amp; Transmigrasi;</li><li>2. BKPM</li><li>3. Kementerian Dalam Negeri</li><li>4. Kementerian Keuangan</li><li>5. Kementerian Perindustrian</li></ol>
13. Peningkatan SDM dan Iptek di Daerah Tertinggal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Budaya dan DIKDASMEN</li><li>2. Kementerian DIKTI dan RISTEK</li><li>3. Kementerian Kesehatan</li></ol>
14. Peningkatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Desa, PDT &amp; Transmigrasi;</li><li>2. Kementerian Perhubungan</li><li>3. Kementerian PU/PERA</li></ol>
15. Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Desa, PDT &amp; Transmigrasi;</li><li>2. Kementerian Perindustrian</li><li>3. Kementerian Perdagangan</li><li>4. Kementerian Pertanian</li><li>5. Kementerian KUKM</li></ol>
16. Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Desa, PDT &amp; Transmigrasi;</li><li>2. Kementerian Dalam Negeri</li></ol>

# K/L Mengetahui Dukungannya pada Pencapaian Agenda Nawacita

No	KL atau SKPD	Kedaulatan Pangan	Kedaulatan Energi	Kemaritiman	Pendidikan	Kesehatan	Industri	Pariwisata	Perbatasan	Daerah Tertinggal
1	PU & Pera	Waduk, Irigasi	Konektivitas	Air Bersih	Konektivitas	Konektivitas	Konektivitas	Konektivitas, Lingkungan Permukiman	Konektivitas	Konektivitas, Sanitasi, Air Bersih, Perumahan
2	Agraria & TR	Reformasi Agraria, Koversi Lahan	Reformasi Agraria, Koversi Lahan	RTRW			RTRW	RTRW	RTRW	
3	Perhubungan		Transportasi BBM dan BBG	Pelabuhan Laut			Konektivitas	Konektivitas	Konektivitas	Konektivitas
4	KLH	Alih Fungsi	Alih Fungsi				Alih Fungsi	Alih Fungsi	Alih Fungsi	Alih Fungsi
5	Pendidikan				Kartu Indonesia Pintar		Politeknik			Standar Pelayanan Minimal
6	Kesehatan					Kartu Indonesia Sehat				Standar Pelayanan Minimal
7	Perindustrian	Agribisnis					Kawasan Industri			
8	KKP			Produksi Perikanan			Produksi Perikanan			
9	ESDM		Pembangkit, Energi Baru	Energi, BBM			Energi	Energi	Energi	Energi

# Penutup

- Pada dasarnya pembahasan dalam rangkaian Rakorbangpus RKP 2016 menitikberatkan pada koordinasi perencanaan program/kegiatan dalam rangka untuk merealisasikan janji Presiden (sasaran NAWACITA).
- **Bagi Kementerian/Lembaga:**
  - Diharapkan masing-masing Kementerian/Lembaga mendalami dengan sungguh-sungguh Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA) yang tertuang pada RPJMN 2015-2019, agar:
    - a. setiap K/L mengetahui perannya dalam mendukung pencapaian tiap sasaran/target Nawacita; dan
    - b. setiap K/L mengetahui kebutuhan dukungan dari K/L lain.
- **Bagi Pemerintah Daerah,** diharapkan:
  - a. setiap Pemerintah Daerah mencermati kegiatan yang akan dilaksanakan oleh K/L di wilayahnya masing-masing;
  - b. mempersiapkan dukungan kegiatan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan daerah; dan
  - c. menyelaraskan kegiatan tersebut dalam RKPD.



**Terima Kasih**